

# STRATEGI PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG

<sup>1</sup>Durratun Nashihah, <sup>2</sup>Rani Auliawati Rachman, <sup>3</sup>Ulfa Binada, <sup>4</sup>Bahagia Nastiti, <sup>5</sup>Laila Dwi Yulitasari

*Center of Policy and Development Studies*

*e-mail: durratunn12@gmail.com*

**DOI:** <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i1.173>

**Abstrak:** Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Malang beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga dibutuhkan strategi agar nilai akuntabilitas terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran strategi peningkatan akuntabilitas dan manajemen kinerja pada pemerintah di Kota Malang. Hasil penelitian ini yakni strategi peningkatan akuntabilitas dan manajemen kinerja pada Pemerintah Kota Malang diantaranya Perangkat Daerah melakukan survei kepuasan pada masyarakat disetiap layanannya secara periodik, perlunya memperkuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelayanan publik, meningkatkan penyesuaian standar dan program *review* dengan melibatkan masyarakat (*citizen charter*), meningkatkan tingkat intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publik, menyediakan dan mengelola fasilitas pengaduan masyarakat, mendorong adanya inovasi pelayanan disetiap perangkat daerah, dan melakukan sosialisasi kebijakan evaluasi pelayanan secara berkala.

**Kata kunci:** Peningkatan Strategi, SAKIP, Manajemen Kinerja

**Abstract:** *The level of accountability for the performance of the Malang City Government in recent years has increased significantly, so a strategy is needed so that the value of accountability continues to increase. The purpose of this study is to provide an overview of strategies for improving accountability and performance management in the government in Malang City. The results of this study are strategies for increasing accountability and performance management in the Malang City Government, including the Regional Apparatus conducting satisfaction surveys on the community in each of its services periodically, the need to strengthen SOPs (Standard Operating Procedures) in public services, increasing adjustments to standards and review programs by involving the community (citizen charter), increasing the level of intensity of coordination between regional devices in order to improve public service innovation, providing and managing community complaints facilities, encouraging service innovation in every regional apparatus, and socializing service evaluation policies on a regular basis.*

**Keyword:** *Improvement Strategy, SAKIP, Performance Management*

## PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi organisasi pemerintah saat ini adalah adanya pemikiran pejabat pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya mengandalkan kemampuan lembaga dalam menyerap anggaran yang dikeluarkan, yaitu keberhasilan lembaga hanya menekankan pada *input*, aspek tanpa melihat tingkat *output* atau dampak yang mungkin terjadi masih jauh dari standar (Raharja *et al*, 2018).

Perbaikan tata kelola dan sistem manajemen merupakan agenda penting

dalam reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tertib dan efektif yang disebut Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) (Winoto, 2021).

Akuntabilitas adalah pelaporan tentang apa, bagaimana, dan mengapa sumber daya dialihkan untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dilaksanakan, dan hubungan kekuasaan

yang diberikan dengan hasil pelaporan (Karima *et al.*, 2021). Dimana bentuk pertanggungjawaban individu atau kelompok yang disertai untuk melaksanakan tugas tertentu terhadap amanat secara vertikal maupun horizontal. (Rusdiana & Nasihudin, 2018). Akuntabilitas juga merupakan kewajiban seseorang atau lembaga untuk mengungkapkan dan melaporkan tindak lanjut kegiatannya kepada pihak yang lebih tinggi (Nasution & Atika, 2019).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai kegiatan, alat dan prosedur yang dirancang untuk keperluan pengukuran dan pengukuran, pengumpulan data, klarifikasi, rangkuman, dan pelaporan kinerja kepada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Di sisi lain, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program utama pemerintah dengan menjadikannya sebagai salah satu dari tiga target reformasi birokrasi. Selain itu, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu sub indikator dari sasaran utama pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2018-2023. dimana pada level tahun 2019 pemerintah menargetkan 50% pemerintah kabupaten/kota memiliki akuntabilitas yang baik. Namun hingga saat ini penerapan SAKIP masih belum optimal. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam melakukan penelitian, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Kajian pertama Yusrianti dan Safitri (2015) melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai indeks cakupan dan tingkat klasifikasi penerapan SAKIP di SKPD serta mengetahui kendala dalam penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum tuntutan tingkat pelaksanaan SAKIP pada LAKIP SKPD Kota Palembang berada pada tingkat klasifikasi yang kurang baik sehingga sangat membutuhkan bantuan dalam penyusunan LAKIP oleh BPKP. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP SKPD antara lain lemahnya fungsi pengawasan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten dan belum adanya review LAKIP sehingga tidak dapat mendeteksi LAKIP. SKPD yang tidak sesuai dengan pedoman. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaporan dan penyelesaian laporan kinerja instansi, kurangnya komitmen pimpinan instansi terkait pelaksanaan SAKIP, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pelaporan dan penyusunan LAKIP, serta lemahnya koordinasi antar sektor di setiap SKPD juga menjadi faktor penyebab menyebabkan rendahnya kualitas LAKIP SKPD di Kota Palembang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wardhana *et al* (2015) menguji Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi.

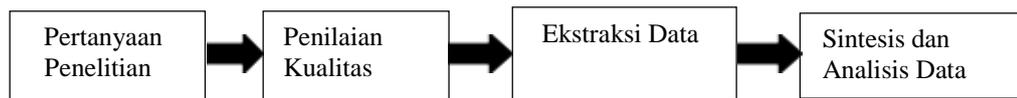
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan metode analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap AKIP, artinya kompetensi sangat membantu untuk menciptakan AKIP yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Sedangkan komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi terhadap AKIP. Komitmen organisasi berpotensi mempengaruhi hubungan kompetensi dengan AKIP, semakin tinggi komitmen organisasi kepala SKPD maka upaya peningkatan AKIP juga akan semakin meningkat.

Pelaksanaan SAKIP meliputi proses perencanaan, kesepakatan kinerja, proses pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, dan pelaporan hingga evaluasi kinerja perangkat daerah (Mangar *et al.*, 2021; dan Sitti, 2020). Proses perencanaan diarahkan pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Kedua, kesepakatan kinerja sebagai bentuk kesepakatan antara pemberi mandat kinerja dan penerima mandat berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kerangka atas kerangka kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dicairkan. Terakhir, evaluasi bertujuan untuk mengetahui realisasi, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan misi, sehingga dapat dikaji untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan strategi untuk meningkatkan SAKIP di Kota Malang. Peneliti memilih Pemerintah Kota Malang karena memiliki skor SAKIP yang cukup baik dan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai SAKIP di Kota Malang diperlukan komponen analisis berupa evaluasi (kelemahan dan kekuatan) untuk merumuskan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi peningkatan akuntabilitas dan manajemen kinerja di kota Malang. *Review* strategi yang digunakan untuk menentukan akurasi atau keberhasilan strategi. Keberhasilan dapat diukur dengan menggunakan hasil penilaian SAKIP. Selanjutnya dalam penelitian ini dapat dimonitor dan dievaluasi sebagai tahap implementasi, kegunaan, dan juga untuk mencapai kualitas yang baik.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur. Tujuan studi pustaka adalah untuk memberikan gambaran tentang strategi peningkatan akuntabilitas dan manajemen kinerja bagi Pemerintah Kota Malang. Literatur *review* yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti jurnal atau artikel penelitian, laporan, dan sebagainya. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, memodifikasi, dan mengevaluasi sumber primer atau penelitian sebelumnya (Libguides, 2021). Penelitian ini menggunakan kata kunci pencarian “akuntabilitas”, “fungsi akuntabilitas”, “tingkat akuntabilitas Kota Malang”, “SAKIP Pemerintah Kota Malang”, “LKJIP Kota Malang”, “RPJMD Kota Malang”, dan “Strategi Peningkatan Instansi Pemerintahan”. Akuntabilitas". Tahapan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti secara detail dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1. Tahap Studi Pustaka**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

Gambar 1 menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk mempelajari literatur meliputi a) Pertanyaan Penelitian; b) Penilaian Kualitas; Ekstraksi Data; dan e) Sintesis dan Analisis Data. Pada langkah pertama, peneliti menentukan ruang lingkup dan memfokuskan penelitian secara khusus pada suatu topik untuk menyusun kompilasi inklusi dan ekstraksi eksklusif. Selanjutnya penilaian kualitas dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan literatur yang relevan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Setelah penilaian kualitas selesai, peneliti menilai literatur secara rinci untuk mengekstrak informasi yang relevan dan menilai elemen data yang terkandung. Langkah terakhir dalam proses studi literatur adalah menyusun rangkuman dan analisis sesuai dengan data yang diidentifikasi atau dikenal dengan sintesis dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

#### a. Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kota Malang

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator target dalam Kesepakatan Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran dilakukan terhadap pencapaian tahun ini terhadap pencapaian tahun sebelumnya, dan terhadap target jangka menengah.

Secara keseluruhan kinerja Pemkot Malang tahun 2021 dinyatakan “berhasil” karena rata-rata pencapaiannya mencapai 94% dari target. Target 100% belum tercapai karena pada tahun 2021 bencana non alam berupa pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut yang akan berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Beradaptasi dengan kondisi *new normal* menuntut kita untuk lebih siap berinovasi dalam menyerukan target kinerja. Pasalnya, perubahan pola kerja di masa pandemi COVID-19 cukup berdampak pada pelecehan kinerja. Masih ada beberapa indikator yang belum berhasil dicapai.

Untuk mendukung kemampuan kinerja pada tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan perbaikan prioritas pembangunan yang menekankan pada strategi pemulihan dari dampak COVID-19, serta target kinerja, sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2018-2023.

**Tabel 1. Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks pendidikan	77,00	78,45	101,88 %
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks kesehatan	81,80	82,09	100,35 %
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/purchasing power parity	85,00	84,73	99,68%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	6,20%	4,96%	80%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	4,20	4,23	100,71 %
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	67,57	60,46	89,48%
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	1. Tingkat pengangguran terbuka 2. Persentase penurunan PMKS	8.2 5	9,65% -0,42%	82,32% 0%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	1. Indeks pembangunan masyarakat (IPMas) 2. Indeks pembangunan gender (IPG)	86,80 97,00	84,15 95,16	96,95% 98,10%
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60%	100%	166,67 %
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK 3. Maturitas SPIP 4. Rasio PAD	82,05 WTP 3,10 0,28	80,05 WTP 3,634 0,28	97,56% 100% 117,23 % 100%
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks profesionalitas ASN	74,38	74,68	100,40 %
12	Meningkatnya integrasi teknologi informasi	Indeks kematangan SPBE	4,21	2,73	64,85%

Sumber: LKJIP Kota Malang, 2022

#### **b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang**

Pencapaian sasaran strategis sasaran kinerja sesuai RPJMD dan Kesepakatan Kinerja yang termasuk dalam kategori Berhasil dan Sangat Berhasil adalah upaya tepat sasaran:

- 1) Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan. Target dapat tercapai 101,88% dengan

dukungan program prioritas yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pencapaiankinerjasebesar 97% (rata-rata dari capaian APK PAUD, APM PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP, dan rata-rata capaian peningkatan karakter PAUD,SD dan SMP), terutama dukungan pada capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Akan tetapi perlu upaya dalam pencapaian APK dan APM

- PAUD serta APM SD. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Indeks Kesehatan. Target tersebut dapat tercapai 100,35% terutama dengan adanya dukungan program pemenuhan upaya kesehatan jiwa dan upaya kesehatan masyarakat terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi UKM dan UKP pemerintah daerah kabupaten/kota dan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan bagi UKM dan rujukan UKP di tingkat kabupaten/kota yang merupakan upaya pemenuhan SPM di bidang kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperbaiki indikator program Angka Kematian Ibu dan NDR yang belum tercapai sesuai target.
- 2) Meningkatnya daya beli komoditas pangan dan non pangan, dengan indikator Indeks Paritas Daya Beli. Target 99,68% tersebut tercapai dengan dukungan beberapa program antara lain Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Keamanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Pokok, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perizinan dan Registrasi Perusahaan, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - 3) Peningkatan pemerataan infrastruktur pembangunan dan infrastruktur kota secara terintegrasi dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur (IKLI). Target tersebut dapat tercapai 100,71% dengan dukungan beberapa program antara lain Program Penataan Gedung, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hampir semua indikator dapat tercapai dengan baik, namun diperlukan upaya pembenahan diri untuk mencapai target program yang belum sesuai dengan harapan terutama dalam penanganan infrastruktur, rumah tidak layak huni dan ketersediaan debit udara melalui pengadaan bangunan penyimpanan.
  - 4) Peningkatan keberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Target tersebut tercapai dengan rata-rata 97,53% dengan dukungan program terbesar adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (di 57 Kelurahan) dan beberapa program di Dinas Sosial P3AP2KB untuk fokus pada peningkatan IPG seperti Pengarusutamaan Gender Program dan Pemberdayaan Perempuan.
  - 5) Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Hukum dengan indikator Persentase Perda yang ditegakkan. Target tersebut tercapai sebesar 166,67% dengan dukungan program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dari 26 Perda yang memuat sanksi, sebanyak 15 Perda diberlakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan 11 Perda

lainnya oleh Perangkat Daerah terkait. Target pencapaian program adalah seluruh Peraturan Daerah telah diberlakukan atau 100%.

- 6) Meningkatkan kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, Jatuh Tempo SPIP dan Rasio PAD. Target rata-rata tercapai sebesar 104% melalui dukungan beberapa program antara lain Program Dukungan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah, Program Administrasi Pemerintahan dan Layanan Umum yang dilaksanakan oleh kecamatan, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelaksanaan Pengawasan.
- 7) Meningkatkan kualitas meritokratis manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN. Target tersebut tercapai sebesar 100,4% melalui dukungan Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Dukungan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (terkait dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan). Kompetensi kerja keseluruhan program hampir memenuhi target dengan rata-rata 97,61%.

Sedangkan seruan target kinerja strategis sesuai RPJMD dan Kesepakatan Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah target:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif didukung oleh perangkat daerah bagi para pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan penjualan baik secara langsung maupun melalui platform digital. Namun, pandemi

COVID-19 masih sangat berpengaruh terhadap dunia usaha sehingga peningkatan ekonomi kreatif belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tahun 2021 sebesar 4,96% atau mencapai 80% dari target RPJMD, dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 8,85%.

- 2) Peningkatan kualitas tata ruang dan manfaat lingkungan, dengan target 89,48%. Meskipun belum sesuai harapan, diperlukan upaya untuk meningkatkan indeks pada variabel IKLHD pada tahun-tahun berikutnya.
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan sosial, dengan pencapaian rata-rata 41,16% dimana indikator proporsi pengurangan PMKS tidak tercapai karena masih berlanjutnya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi. Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka telah meningkat. Sedangkan PMKS yang termasuk di dalamnya adalah jumlah penduduk miskin. Hal inilah yang membuat indikator tersebut tidak dapat tercapai. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi proporsi PMKS adalah dengan memberikan pelatihan dasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan sosial, baik tunai maupun non tunai. Namun karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, penurunan proporsi PMKS masih belum signifikan. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2020 sebesar 1,08%, maka Tahun 2021 sudah berjalan meskipun belum mampu menurunkan jumlah PMKS secara signifikan.
- 4) Peningkatan integrasi Teknologi Informasi, dengan kapabilitas target terbesar 64,85%. Indeks

Kematangan SPBE masih belum dapat mencapai target karena adanya perubahan variabel/komponen dan penambahan indikator (yaitu indikator Pengelolaan SPBE) dalam penilaian SPBE oleh Kementerian PANRB sehingga hasil penilaian akhir menjadi lebih kecil.

### c. Strategi Peningkatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

- 1) Integrasi program dan kegiatan pengentasan/ penanggulangan kemiskinan antar kerja sama Perangkat Daerah harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan melibatkan masyarakat agar pembangunan tepat sasaran dan strategi ke depan adalah pemutakhiran data kemiskinan sesuai dengan yang berlaku peraturan dan menggunakan data misi untuk target program dan kegiatan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan upaya pemenuhan variabel dalam komponen SPBE melalui pemenuhan indikator Pengelolaan SPBE dan penguatan regulasi peraturan perundang-undangan daerah terkait SPBE.
- 3) Peningkatan kolaborasi Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya dalam pembinaan ekonomi kreatif melalui penguatan pelaku ekonomi kreatif melalui pendampingan yang berkelanjutan, Aktivasi MCC (wadah/ekosistem ekonomi kreatif), Aktivasi *co-working space* di 5 Kecamatan, pembinaan/*event* industri kreatif.
- 4) Peningkatan kolaborasi Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya dalam mengurangi jumlah

pengangguran melalui penguatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi pelaksanaan *job fair* melalui aplikasi

## 2. Pembahasan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Malang dilihat melalui telaah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun setiap akhir tahun anggaran melalui evaluasi target kinerja dengan dokumen perencanaan pembangunan. Untuk menghitung nilai akuntabilitas secara keseluruhan, perlu dilakukan perhitungan setiap komponen AKIP sebagai barometer penilaian, Kabupaten Pamekasan berpedoman pada predikat dan menginterpretasikan hasil penghitungan nilai AKIP untuk pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kementerian PPN dan Birokrasi. Pembaruan.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka strategi utama yang harus dilakukan menurut Raharja dkk, 2018 adalah memperkuat komitmen. Penguatan komitmen merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Malang. Hal ini karena komitmen merupakan langkah awal dan kunci utama dalam penerapan SAKIP. Penguatan komitmen dapat dilakukan mulai dari pimpinan puncak, dalam hal ini Walikota dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah, untuk mulai terlibat aktif dalam perencanaan. Kemudian penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meminimalisir potensi inefisiensi anggaran karena semua program/kegiatan akan memiliki keterkaitan atau menjadi jalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Selanjutnya terkait dengan pengembangan SAKIP. SAKIP dapat dibina melalui pemberian pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis

kepada seluruh Perangkat Daerah. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas APIP. Inspektorat melalui APIP mempunyai tugas mengevaluasi pelaksanaan SAKIP di tingkat Perangkat Daerah. Sebagai evaluator, seharusnya APIP memiliki pemahaman yang komprehensif tentang SAKIP itu sendiri.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Malang adalah belum adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala di setiap Perangkat Daerah, survei kepuasan masih menggunakan metode penggabungan regulasi dan keilmuan sehingga hasilnya belum bisa dikatakan akurat untuk mengukur nilai yang sebenarnya, serta rendahnya motivasi dan semangat aparatur daerah dalam melakukan inovasi pelayanan yang dapat berdampak pada nilai kepuasan masyarakat. Oleh karena itu dilakukan strategi peningkatan akuntabilitas diantaranya 1) Setiap Perangkat Daerah melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat di setiap pelayanannya secara berkala, untuk kemudian dilaporkan kepada sekretaris daerah dan hasilnya dipublikasikan; 2) Perlunya penguatan SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam pelayanan publik; 3) Meningkatkan penyesuaian standar dan meninjau program dengan keterlibatan masyarakat (*citizen charter*); 4) Meningkatkan tingkat intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik; 5) Menyediakan dan mengelola fasilitas pengaduan masyarakat; 6) Mendorong inovasi pelayanan di setiap perangkat daerah; dan 7) Melakukan sosialisasi kebijakan evaluasi pelayanan secara berkala.

### DAFTAR PUSTAKA

- Karima, D., Maslichah., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(6), 10–24.
- Mangar, J. T., Mingkid, E., & Kawung, E. (2021). Manajemen Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(100), 33–42.
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E- Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LN.2014/NO.80, LL SETKAB : 18 HLM.
- Raharja, Enditya Luhur dkk. 2018. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Vol 10 (2): 60-75
- Rusdiana, & Nasihudin. (2018). Akuntabilitas Kinerja Penelitian. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sitti, M. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. *JEMA Adpertisi*, 1(2), 59–7

- Wardhana GAS, Rasmini NK, Astika IBP. 2015. Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 4(9): 571-598.
- Winoto, Suhartono. 2021. Strategy to Improve Accountability and Performance Management in Pamekasan Regency Government. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Vol 7 (3): 334-340
- Yusrianti H, Safitri RH. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 13(4): 545-558.